

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Pemberdayaan

#### 1. Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang mengandung arti berdaya atau mampu. Pemberdayaan masyarakat merupakan usaha untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat yang kurang beruntung agar dapat mengatasi keadaan tersebut. Pemberdayaan adalah usaha dalam hal meningkatkan kapabilitas kemampuan masyarakat dengan cara mendorong, membangkitkan, memotivasi akan potensi yang dimiliki dan dapat bekerjakeras untuk mengembangkan potensi tersebut.<sup>1</sup>

Dalam arti lain dikatakan bahwa pemberdayaan sebagai upaya dalam membangun daya masyarakat dengan cara memotivasi, mendorong serta membangkitkan kesadaran atas potensi dan kemampuan yang dimiliki untuk mengembangkannya.<sup>2</sup> Pemberdayaan diartikan sebagai proses untuk memberikan daya ( *power* ) kepada pihak yang lemah ( *powerless* ) dan meminimalisir pihak yang terlalu menguasai.<sup>3</sup> Dalam pemberdayaan merupakan langkah yang digunakan dalam membangun masyarakat yang difokuskan dalam bidang intelektualitas, bidang

---

<sup>1</sup> Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik*, Cetakan ke-1 (Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2013), 24–25.

<sup>2</sup> Daniel Sulekale, *Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Era Otonomi Daerah*, Diakses melalui [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=ARTIKEL+DANIEL+SULEKALE&btnG](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=ARTIKEL+DANIEL+SULEKALE&btnG) pada Hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 Pukul 11.58 WIB.

<sup>3</sup> Oos M Anwas, *Pemberdayaan masyarakat di era global* (Jakarta: Alfabeta, 2013), 49.

sosial – budaya, bidang ekonomi – politik serta bidang keamanan dan lingkungan.<sup>4</sup>

Konsep pemberdayaan erat kaitannya dengan 2 konsep utama yaitu konsep daya (*power*) dan konsep ketimpangan (*disadvantage*). Pemberdayaan mengacu pada kemampuan individu, terutama pada kelompok lemah sehingga kelompok tersebut memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan utamanya. Disisi lain mereka juga terbebas dari kelaparan, kemiskinan, kebodohan, serta mampu menjangkau sumber-sumber produktif yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui peningkatan pendapatan dan kebutuhan primer ataupun sekunder dan ikut serta dalam pembangunan masyarakat.<sup>5</sup>

Rekonstruksi hubungan antara subjek dan objek merupakan perwujudan dari keberdayaan. Proses tersebut mengisyaratkan bahwa harus adanya pengakuan terkait kemampuan yang dimiliki oleh objek. Proses ini memandang bahwa betapa pentingnya *flow of power* (transfer kekuasaan) dari subjek ke objek.<sup>6</sup> Dalam hal ini suatu pengakuan kemampuan serta hubungan antara subjek dan objek sangat

---

<sup>4</sup> Mohamad Ikbah Bahua, *Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani Indonesia* (Gorontalo: Ideas Publishing, 2015). 5.

<sup>5</sup> Edi Suharto, *Mengembangkan Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung: Rifka Aditama, 2005). 58.

<sup>6</sup> Abdul Bashit, “Ekonomi Kemasyarakatan Visi dan Strategi Pemberdayaan Sektor Ekonomi Lemah” (Malang : UIN-Maliki Press, cetakan I 2011), Diakses melalui <https://scholar.google.co.id/citations?user=R7m6OGwAAAAJ&hl=id> pada Hari Rabu Tanggal 16 Maret 2022 Pukul 12.08 WIB.

berperan dalam menentukan perwujudan dalam keberdayaan terhadap masyarakat.

Secara konseptual, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

Menurut Sunyoto Usman, pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses dalam bingkai usaha memperkuat apa yang lazim disebut *community self reliance* atau kemandirian. Dalam proses ini masyarakat didampingi untuk membuat analisis masalah yang dihadapi, dibantu untuk menemukan alternative solusi masalah tersebut, serta diperhatikan strategi memanfaatkan berbagai *resources* yang dimiliki dan dikuasai. Dalam proses itu masyarakat dibantu bagaimana merancang sebuah kegiatan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, bagaimana mengimplementasikan rancangan tersebut, serta bagaimana membangun strategi memperoleh sumber-sumber eksternal yang dibutuhkan sehingga memperoleh hasil optimal.<sup>7</sup>

## 2. Tujuan Pemberdayaan

Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat khususnya kelompok lemah yang memiliki

---

<sup>7</sup> Idvit Iganuzepri Abkim, "Analisis Program Pemberdayaan Ekonomi Petani dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat menurut Perspektif Ekonomi Islam" (*Skripsi* Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019). 42.

ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal (misalnya persepsi masyarakat sendiri), maupun karena kondisi eksternal (misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil). Guna melengkapi pemahaman mengenai pemberdayaan perlu diketahui konsep mengenai kelompok lemah dan ketidakberdayaan yang dialaminya.<sup>8</sup> Suhartini pada bukunya menyebutkan tujuan pemberdayaan masyarakat miskin pada perkotaan, yaitu :

- a. Adanya peningkatan dalam bidang lingkungan baik dari segi fisik, sarana maupun prasarana kondisi sosial ekonomi masyarakat.
- b. Pemberdayaan masyarakat memiliki tujuan untuk menumbuhkan kemampuan atau kreatifitas masyarakat yang berguna untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat.
- c. Selain itu pemberdayaan juga memiliki tujuan lain yaitu untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan dan meningkatkan sumber pendapatan sehingga perekonomian keluarga terjamin.<sup>9</sup>

Dan dalam pemberdayaan terhadap masyarakat memiliki tujuan penting yang bersifat pembangunan yang berkelanjutan ( *sustainable development* ) sehingga World Bank menyaratkan hal – hal yang perlu dipersiapkan untuk membangun pembangunan yang berkelanjutan, diantaranya :

---

<sup>8</sup> Hilda Hidayatus Sibyan, “Upaya Peningkatan Ketahanan Pangan Rumah Tangga Melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Dusun Bulurejo Desa Kepuhrejo Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang” (*Skripsi* Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018), 28.

<sup>9</sup> Riczi Bayu Andika Ainur Rachman, “Peran Pemberdayaan Perempuan Difabel Dalam Meningkatkan Kesejahteraan” (*Skripsi* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2020), 29.

- a. Perbaikan modal finansial, berupa pengelolaan fiskal dan perencanaan ekonomi makro,
- b. Perbaikan modal fisik, seperti sarana pra sarana,
- c. Perbaikan modal sumber daya manusia, seperti perbaikan dalam bidang pendidikan,
- d. Pengembangan modal sosial, seperti keterampilan masyarakat, bentuk kerjasama atau kemitraan, kelembagaan serta hal – hal yang berhubungan dengan norma sosial,
- e. Pengelolaan sumber daya alam, seperti air, pengelolaan Limbah pabrik, dan lain sebagainya.

Dengan konsep yang telah dijelaskan diatas, bahwa tujuan pemberdayaan meliputi berbagai upaya dalam perbaikan, diantaranya :

- a. Perbaikan pendidikan (*better education*) dalam hal ini konsep dirancang agar masyarakat memiliki pendidikan yang lebih maju. Tidak membatasi pada perbaikan tempat, perbaikan materi, serta hubungan fasilitator dan penerima manfaat, namun yang lebih diutamakan ialah perbaikan dalam menumbuhkan semangat belajar.
- b. Perbaikan aksesibilitas (*better accesbility*) dalam hal ini dikatakan bahwa di dalam konsep pemberdayaan berkesinambungan dengan perbaikan pendidikan sehingga diharapkan untuk memperbaiki aksesibilitasnya terutama tentang informasi dan komunikasi,

sumber pembiayaan, pengadaan peralatan dan produk serta lembaga pemasaran.

- c. Perbaikan tindakan (*better action*) dalam perbaikan tindakan bahwa diharapkan ketika perbaikan pendidikan dan perbaikan aksesibilitas maka, tindakan – tindakan yang dilakukan juga akan lebih baik,
- d. Perbaikan kelembagaan (*better institution*) dalam hal ini diharapkan agar masyarakat dapat mengembangkan jaringan kemitraan atau kerjasama antar institusi,
- e. Perbaikan usaha (*better business*) dalam hal ini diharapkan bahwa aspek – aspek diatas dapat mengembangkan usaha atau bisnis yang akan dan sedang dijalankan,
- f. Perbaikan pendapatan (*better income*) dalam hal ini apabila perbaikan usaha telah dilakukan maka akan berimbas pada pendapatan masyarakat tersebut,
- g. Perbaikan lingkungan (*better environment*) dalam hal ini diharapkan apabila usaha yang dimiliki masyarakat membaik, maka pendapatan akan meningkat sehingga akan meminimalisir kerusakan lingkungan karena sebagian besar kerusakan lingkungan disebabkan oleh kemiskinan dan pendapatan yang kurang,
- h. Perbaikan kehidupan ( *better living* ) apabila konsep diatas berjalan dengan baik, pendapatan membaik, lingkungan membaik maka dampak yang ditimbulkan terhadap kehidupan berkeluarga atau bermasyarakat akan membaik pula,

- i. Perbaiki masyarakat (*better community*) dalam hal ini diharapkan bahwa ketika kehidupan membaik maka akan terwujudnya lingkungan masyarakat atau interaksi terhadap masyarakat akan membaik pula.<sup>10</sup>

### 3. Proses Pemberdayaan

Dalam buku Rajuminropa menjelaskan terkait proses dalam pemberdayaan yaitu kecenderungan primer dimana dalam proses ini memberikan kekuatan serta kemampuan terhadap individu kepada masyarakat sehingga dapat berupaya dalam membangun asset materil untuk membangun kemandirian melalui komunitas dan yang kedua adalah kecenderungan sekunder dimana proses tersebut menitik tekankan dalam memberikan dorongan atau motivasi terhadap individu sehingga dapat berdaya dalam menentukan kehidupannya.

Tahapan-tahapan Pemberdayaan Isbandi Rukminto Adi dengan rumusan strateginya yang menjadikan beberapa tahap dalam melakukan pemberdayaan yakni:

- a. Tahapan Persiapan (*engagement*), tahap persiapan ini memiliki substansi penekanan pada dua hal elemen penting yakni penyiapan petugas dan penyiapan lapangan.
- b. Tahap Pengkajian (*assessment*), sebuah tahapan yang telah terlibat aktif dalam pelaksanaan program pemberdayaan karena

---

<sup>10</sup> Totok, *Pemberdayaan Masyarakat*, 110 – 112.

masyarakat setempat yang sangat mengetahui keadaan dan masalah ditempat mereka berada.

- c. Tahap Perencanaan Alternatif Program atau Kegiatan (*designing*). Dalam tahap ini program perencanaan dibahas secara maksimal dengan melibatkan peserta aktif dari pihak masyarakat guna memikirkan solusi atau pemecahan atas masalah yang mereka hadapi di wilayahnya.
- d. Tahap Performulasian Rencana Aksi (*designing*), pada tahap masyarakat dan fasilitator menjadi bagian penting dalam bekerjasama secara optimal.
- e. Tahap Pelaksanaan Program atau Kegiatan Implementasi, tahap ini merupakan bentuk pelaksanaan serta penerapan program yang telah dirumuskan sebelumnya bersama para masyarakat. Tahapan ini berisi tindakan aktualisasi bersinergi antara masyarakat dengan petugas pemberdayaan.<sup>11</sup>
- f. Tahap Evaluasi, tahapan yang memiliki substansi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas terhadap program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan dengan melibatkan warga. Tahap ini juga akan merumuskan berbagai indikator keberhasilan suatu program yang telah diimplementasikan serta dilakukan pula bentuk-bentuk stabilisasi terhadap perubahan atau kebiasaan baru yang diharapkan terjadi.

---

<sup>11</sup> Isbandi Rukmito Adi, *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas: Pengantar pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis* (Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 2001). 173 – 178.



g. Tahap terminasi (*disengagement*), sebuah tahapan dimana seluruh program telah berjalan secara optimal dan petugas fasilitator pemberdayaan masyarakat sudah akan mengakhiri kerjanya. Dari pengertian diatas, maka disimpulkan bahwa yang dimaksud pemberdayaan adalah suatu upaya pergerakan dalam penguatan sosial agar masyarakat yang awalnya lemah, baik dalam bidang ekonomi, sosial, politik dapat diberdayakan dengan mendorong, memotifasi serta membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya hingga mereka mandiri.<sup>12</sup>

#### 4. Upaya Pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu cara untuk membangun kemampuan (*capacity building*) masyarakat dan memberdayakan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan cara pendampingan, penyuluhan dan pelayanan. Upaya pemberdayaan harus dilakukan dengan tiga arah yaitu menciptakan iklim yang diharapkan agar kemampuan dapat berkembang, memperkuat potensi atau kemampuan, dan melindungi masyarakat.<sup>13</sup>

Proses pemberdayaan diperlukan seorang fasilitator yang memiliki sifat multidisiplin sebagai tim pendamping ini merupakan salah satu faktor dari luar dalam proses pemberdayaan masyarakat.<sup>14</sup> Proses

---

<sup>12</sup> Savitri Wardani Ambarwati, "Manajemen Program Dana Bergulir Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Studi Pada Lembaga Amil Zakat Masjid Agung Kota Kediri". (*Skripsi* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2020), 28-29.

<sup>13</sup> Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat wacana dan praktik* (Jakarta:Kencana Prenadamedia group, 2013). 79.

<sup>14</sup> Totok Mardikanto, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, 46.

pemberdayaan dilakukan secara kolektif, dengan demikian tidak seluruh intervensi fasilitator dapat dilakukan secara kolektivitas.<sup>15</sup>

Upaya yang dilakukan untuk membangkitkan kesadaran suatu individu yaitu dengan membawanya keruang lingkup yang lebih luas seperti, bidang sosial dan bidang politik sehingga individu tersebut akan melihat permasalahan, aspirasi, impian, serta kekecewaan mereka dari sudut pandang sosial dan politik yang lebih makro.<sup>16</sup>

## 5. Prinsip Pemberdayaan

Menurut Zubaedi terdapat empat prinsip dalam pengembangan masyarakat yaitu *pertama*, pengembangan masyarakat menolak adanya pandangan tentang tidak memihak dalam sebuah kepentingan. *Kedua*, prinsip pengembangan adalah mengubah tentang diskriminatif, pemaksaan, penindasan terhadap masyarakat. Prinsip yang *ketiga* yaitu membebaskan masyarakat dalam menyampaikan pendapat secara demokratis. Prinsip yang terakhir yaitu mampu mengakses program – program pelayanan terhadap masyarakat.<sup>17</sup>

Menurut Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato bahwa pemberdayaan memiliki prinsip – prinsip, berikut :

- a. Mengerjakan berarti mengajak masyarakat dalam melakukan pekerjaan atau menerapkan sesuatu,

---

<sup>15</sup> Ibid., 160.

<sup>16</sup> Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas pengembangan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat* ( Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2008 ), 96 – 97.

<sup>17</sup> Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik* 37 – 40.

- b. Akibat berarti dalam pemberdayaan harus memiliki akibat atau pengaruh yang baik terhadap masyarakat, hal ini menentukan untuk keikutsertaan kegiatan selanjutnya,
- c. Asosiasi berarti setiap kegiatan dalam pemberdayaan harus dikaitkan dengan kegiatan yang lain.<sup>18</sup>

## 6. Indikator Pemberdayaan

Dalam mengetahui tujuan dari pemberdayaan secara praktik, maka perlu adanya indikator untuk membantu dalam mengetahui bahwa seseorang tersebut dapat dikatakan berdaya atau tidak. Perekonomian pada masyarakat dikatakan berdaya apabila termasuk dari salah satu atau beberapa dari variabel. Diantaranya :

- a. Berkemampuan untuk mencukupi kebutuhan dasar.
- b. Berkemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan.
- c. Berkemampuan dalam menghadapi serangan dan ancaman dari luar.
- d. Berkemampuan untuk melakukan kreasi serta inovasi sebagai bentuk aktualisasi diri dan menjaga eksistensi sebagai bangsa negara.<sup>19</sup>

Gunawan dalam bukunya menuliskan bahwa indikator dalam keberhasilan program pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:

---

<sup>18</sup> Totok Mardikanto, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, 105 – 106.

<sup>19</sup> Nur Mahmudi Isma'il, *Strategi Pemberdayaan Umat dan Pencetakan SDM Unggul dalam Hotmatua Daulay dan Mulyanto (ed), Membangun SDM dan Kapabilitas Teknologi Umat* (Bandung: ISTECS, 2001), 28.

- a. Tingkat kepedulian masyarakat semakin meningkat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya.
- b. Tingkat kemandirian masyarakat semakin meningkat yang ditandai dengan berkembangnya produktifitas anggota komunitas, permodalan yang semakin menguat, administrasi semakin baik.
- c. Meningkatnya pendapatan keluarga kurang mampu dan dapat mencukupi kebutuhan dasar atau kondisi lainnya dapat menunjukkan peningkatan kapasitas masyarakat dan tingkat distribusi pendapatan.

Melalui indikator di atas kita dapat menarik kesimpulan bahwa seseorang dikatakan berdaya ketika dia dapat memenuhi kebutuhannya sendiri membuat lingkungan sekitarnya sejahtera dan dapat mewujudkan ciri – ciri dari pemberdayaan dengan baik.

Ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Transparan
- b. Bertanggung jawab
- c. Menguntungkan
- d. Berlanjut
- e. Dapat diperluas<sup>20</sup>

## **7. Pemberdayaan dalam Pandangan Islam**

Islam merupakan Agama yang menekankan pada kepedulian sosial, karena Islam menegaskan bahwa misi dari setiap ritus Islam

---

<sup>20</sup> Gunawan Sumadiningrat, *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengaman Sosial* (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 1999), 23.

adalah akuntabilitas sosial, tanpa implikasi sosial ritus Islam akan dilakukan secara sia-sia. Oleh karena itu, implikasi sosial telah menjadi sumber kesadaran bagi setiap masyarakat dan memberikan arti penting sebagai sikap terhadap lingkungan sosial (sikap kepedulian). Sikap kepedulian tersebut akan melahirkan pemberdayaan masyarakat. Islam memandang pemberdayaan sebagai gerakan tanpa henti, hal ini sejalan dengan paradigma Islam yaitu sebagai agama gerakan dan perubahan. Seperti yang disampaikan dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11.

لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ  
 مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ  
 وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

Artinya: Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan dibelakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah, Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka yang merubah keadaan, yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah telah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain dia. (QS. Ar-Ra'd (13):11)<sup>21</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa, Allah tidak akan merubah suatu kaumnya melainkan mereka sendiri yang merubahnya. Dengan hal tersebut maka setiap manusia diharuskan untuk merubah dirinya tetapi masih dalam batas Agama Islam. Dalam ayat tersebut juga

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro),199.

menjelaskan kemandirian yang harus dimiliki oleh setiap individu agar mampu menjalankan kegiatannya. Seperti halnya pemberdayaan masyarakat yang merubah seseorang mejadi lebih mandiri dengan mengandalkan kemampuan mereka dengan tidak ada batasan. Dalam proses pemberdayaan masyarakat diizinkan untuk melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya.

Islam dalam pemanfaatan sumber daya alam memberikan petunjuk sebagai berikut:

- a. Al-Quran dan Sunnah memberikan peringatan bahwa alam telah ditundukan untuk umat manusia sebagai salah satu sumber rezeki
- b. Manusia adalah khalifah Allah Swt yang bertugas untuk mengatur, memanfaatkan, dan memberdayakan alam di muka bumi. Sedangkan pemilik yang hakiki adalah Allah Swt.
- c. Islam mengizinkan pemanfaatan sumber daya alam baik untuk kepentingan seseorang ataupun untuk orang banyak.
- d. Manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam harus memerhatikan dan hukum-hukum yang telah ditetapkan Allah Swt yaitu menjaga, memelihara dan memakmurkannya bukan merusak alam yang mengakibatkan punahnya keasian dan keindahan alam semesta.

Mekanisme yang ditawarkan dalam pemberdayaan sumber daya alam ada tiga, yaitu: pertama, diberdayakan oleh pemiliknya sendiri dengan ditanami. Kedua, diserahkan pada orang lain untuk

digarap tanpa adanya kompensasi. Ketiga, memberikan otoritas kepada pihak lain untuk diberdayakan yang di ikuti dengan adanya bagi hasil setengah, sepertiga atau seperempat.

Pertumbuhan ekonomi sangat membutuhkan sumber daya yang dapat digunakan dalam memproduksi aset-aset fisik untuk menghasilkan pendapatan. Aspek fisik tersebut antara lain tanaman. Pada sisi lain, peran modal juga sangat signifikan untuk diperhatikan. Dengan demikian, proses pertumbuhan ekonomi mencakup mobilisasi sumber daya, merubah sumber daya tersebut dalam bentuk asset produktif, serta dapat digunakan secara optimal dan efisien.<sup>22</sup>

Gagasan yang ada dalam paradigma ini belum terbukti, tetapi menyadarkan bahwa betapa pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang lestari. Jika umat manusia menginginkan hidup sejahtera, maka harus memperhatikan keseimbangan ekologi dan ekosistem. Paradigma ini juga berharap masa depan bumi tidak akan terguncang hanya karena kesewenangan manusia dalam mendapatkan fasilitas yang terkandung di dalamnya. Jika efisiensi merupakan konsep ekonomi yang didasarkan pada etika, maka konsep berkelanjutan adalah gabungan antara faktor-faktor politik. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memberi manfaat pada semua (warga masyarakat) termasuk generasi

---

<sup>22</sup> Michael P Todaro, *Economic Development in The Third World* (New York: Longman, 1989), 432.

mendatang secara adil dan merata tanpa adanya suatu efek yang di rasakan untuk selanjutnya.<sup>23</sup>

## **B. Ketahanan Pangan**

### **1. Pengertian Ketahanan Pangan**

Sean Fitriani Rahmawati mengutip pernyataan Soeryana bahwa ketahanan pangan merupakan sistem ekonomi pangan terpadu yang terdiri dari berbagai subsistem. Berkat sinergi ketiga subsistem yaitu subsistem pertama, subsistem ketersediaan pangan ketahanan pangan dapat tercapai, subsistem ini meliputi keseimbangan antara produksi, cadangan, serta impor dan ekspor pangan. Kedua, subsistem distribusi pangan mencakup akses fisik dan ekonomi yang adil terhadap pangan. Ketiga, subsistem konsumsi berkaitan dengan upaya peningkatan kemampuan dan pengetahuan masyarakat agar memiliki pemahaman tentang pangan, gizi, dan kesehatan sehingga dapat mengelola konsumsi dengan sebaik-baiknya.

Menurut Peraturan No. 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan Pemerintah Republik Indonesia, ketahanan pangan adalah suatu keadaan dimana rumah tangga mempunyai cukup pangan, yang didasarkan pada kuantitas atau kualitas, kecukupan pangan yang adil, aman dan wajar dan terjangkau. Menurut definisi tersebut, ketahanan pangan dapat dijelaskan sebagai berikut:

---

<sup>23</sup> Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi* (Yogyakarta: BPFE, 2000), 204



- a. Ketersediaan pangan artinya terpenuhinya kebutuhan pangan yang cukup. Tidak hanya beras untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat, melainkan ternak ikan untuk memenuhi protein dan lemak, serta tanaman untuk memenuhi vitamin bagi pertumbuhan hidup manusia.
- b. Tersedianya kebutuhan pangan yang sehat untuk dikonsumsi, yang berarti terhindar dari pencemaran-pencemaran biologis, kimia ataupun zat yang mengganggu, yang bisa merusak kesehatan tubuh manusia.
- c. Terpenuhinya pangan secara merata, yang diartikan pangaan haruslah bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Tanah Air.
- d. Adanya kebutuhan pangan yang mudah dijangkau, diartikan pangan bisa dengan mudah didapatkan oleh masyarakat dengan harga yang terjangkau.<sup>24</sup>

Kebutuhan pangan Nasional perlu dipenuhi dengan cara memberdayakan sumber daya manusia, sumber daya lokal, sumber daya sosial dan ekonomi yang dimiliki oleh Indonesia, yang berdampak pada kesejahteraan bagi masyarakat. Dimana pola konsumsi masyarakat setiap daerah juga berbeda tergantung dari segi potensi alamnya maupun kebudayaan yang dianut.

Kebutuhan pangan meliputi beberapa faktor yaitu pasokan, penyaluran dan konsumsi. Faktor ketahanan pangan membantu

---

<sup>24</sup> Achmad Suryana, *Kapita Selekta Evolusi Pemikiran Kebijakan Ketahanan Pangan* (Yogyakarta: Bpfe Yogyakarta 2003),103.

memastikan bahwa pasokan pangan memenuhi kebutuhan seluruh penduduk dalam hal kualitas, kuantitas, keragaman, dan keamanan. Distribusi berfungsi mewujudkan distribusi yang efektif dan efisien untuk memastikan masyarakat mendapatkan pangan yang cukup, berkualitas tinggi dan berkelanjutan dengan harga yang terjangkau. Konsumsi berperan dalam memandu pola konsumsi agar pangan atau pangan yang digunakan sesuai dengan prinsip mutu, keanekaragaman, kandungan gizi, keamanan dan kehalalan.<sup>25</sup> Dari sisi sistem pangan, perwujudan ketahanan pangan dicapai melalui kerja sistem kolaboratif yang terdiri dari subsistem keluarga, subsistem lingkungan masyarakat, dan subsistem pemerintahan.

## 2. Stabilitas Pangan

Stabilitas ketersediaan pangan ditingkat rumah tangga diukur berdasarkan kecukupan ketersediaan pangan dan frekuensi makan anggota rumah tanggadalam sehari. Satu rumah tangga dikatakan memiliki stabilitas ketersediaan pangan jika mempunyai persediaan pangandaan pangan anggota rumah tanggadapat makan. Lebih lanjut, kombinasi antara ketersediaan makanan pokok dengan frekuensi makan (3 kali per hari disebut cukup makan, 2 kali disebut kurang makan, dan 1 kali disebut sangat kurang makan)<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Rosi Prabowo, "Kebijakan Pemerintah dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan di Indonesia", dalam jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian Vol 6 No 2, Diakses melalui <https://scholar.google.co.id/> Pada Hari Kamis Tanggal 17 Maret 2022, 63.

<sup>26</sup> Mala Hayati, "Pengaruh Subsidi, produksi dan Ketahanan Pangan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Keluarga Petani di Desa Securai Utara Kecamatan Babalan" (*Skripsi*: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumut, 2018),29.

### 3. Indikator Ketahanan Pangan

FAO (1996) dan UU RI No. 7 tahun 1996, yang mengadopsi definisi dari FAO, ada beberapa komponen yang harus dicapai dan dipenuhi dalam hal ketahanan pangan yakni:

1. Tersedianya pangan yang cukup.

Ketersediaan pangan dalam rumah tangga yang dipakai di dalam pengukuran yang mengacu pada pangan yang cukup dan tersedia dalam jumlah yang mampu memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga.

2. Stabilitas Ketersediaan Pangan

Stabilitas ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga diukur berdasarkan kecukupan ketersediaan pangan dan frekuensi makan anggota rumah tangga dalam sehari. Dalam satu rumah tangga, salah satu cara untuk mempertahankan ketersediaan pangan dalam jangka panjang waktu tertentu adalah dengan mengurangi frekuensi makan dan mengkombinasi bahan makanan pokok misalnya seperti beras dan ubi kayu.

3. Aksesibilitas (kemudahan menjangkau pangan).

Indikator aksesibilitas/keterjangkauan dalam pengukuran ketahanan pangan di tingkat rumah tangga dilihat dari kemudahan rumah tangga memperoleh pangan, yang diukur dari pemilikan lahan serta cara rumah tangga untuk memperoleh pangan. Akses

yang diukur berdasarkan pemilikan lahan dikelompokkan dalam 2 kategori :

- a. Akses langsung (direct access), jika rumah tangga memiliki lahan sawah/ladang.
- b. Akses tidak langsung (indirect access) jika rumah tangga tidak memiliki lahan sawah/ladang. Rumah tangga memperoleh pangan dapat dikelompokkan dalam 2 kategori yaitu produksi sendiri atau membeli.<sup>27</sup>

#### 4. Kualitas (keamanan pangan)

Kualitas/keamanan pangan diukur dengan menggunakan indeks ketahanan pangan dihitung dengan cara mengkombinasikan keempat indikator ketahanan pangan, keberlanjutan (ketersediaan pangan, stabilitas ketersediaan pangan, keberlanjutan dan kualitas/keamanan pangan). Kombinasi antara kecukupan ketersediaan pangan dan frekuensi makan memberikan indikator stabilitas ketersediaan pangan. Kombinasi antara stabilitas ketersediaan pangan dengan akses terhadap pangan memberikan indikator kontinuitas ketersediaan pangan. Indeks ketahanan pangan diukur berdasarkan gabungan antara indikator kontinuitas ketersediaan pangan dengan kualitas/keamanan pangan.

---

<sup>27</sup> Diakses Melalui <http://lipi.go.id/risetunggulan/single/teknologi-pangan-alternatif-lipi/52> Pada Hari Minggu Tanggal 20 Maret 2022. 3

Dari keempat komponen tersebut maka dapat digunakan untuk mengukur ketahanan pangan ditingkat rumah tangga, ini merupakan indikator utama untuk memperoleh indeks ketahanan pangan.<sup>28</sup>

### C. Ketahanan Pangan Menurut Ekonomi Islam

Islam memprioritaskan kebutuhan dasar umatnya agar sejalan dengan tujuan ajaran Islam (yaitu pelestarian jiwa, pemikiran, agama, garis keturunan dan kehormatan). Tanpa kebutuhan paling dasar, kehidupan manusia tidak akan terwujud. Kebutuhan tersebut antara lain makanan, minuman, tempat tinggal, kesehatan, keamanan, pengetahuan dan pernikahan.<sup>29</sup> Pangan memiliki banyak fungsi yang kaitannya dengan *Maqashid Syariah*, fungsi pangan diantaranya untuk mengisi perut yang kosong, identitas budaya, fungsi religi, fungsi ekonomi, dan sebagai simbol kekuasaan dan kekuatan. Terpenuhinya pangan akan menjadikan masyarakat senantiasa siap untuk melakukan aktifitas fisik. Hal ini menjadikan tubuh dapat teroptimalisasi peruntukannya. Tubuh yang sehat dapat bekerja dengan baik. *Maqashid Syariah* akan tercipta beriringan dengan kebutuhan pangan yang tercukupi dengan baik dan keterjangkauannya. Oleh karena itu, menjaga ketahanan pangan menjadi penting agar manusia dapat terus hidup dan mencapai tujuan hukum Islam.

Ekonomi Islam memiliki arti sebagai salah satu ilmu yang multi dimensi/interdisiplin, komperhensif, dan saling terintergrasi, meliputi ilmu

---

<sup>28</sup> Sianipar, Dkk, "Analisis Ketahanan Pangan Rumah Tangga Tani Di Kabupaten Monokwari", Jurnal Istilah Ekonomi Pertanian, Fakultas Ekonomi UGM Yogyakarta, 8,2 (Februari 2012)

<sup>29</sup> Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Depok: KENCANA,2017),66.

Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadist, dan juga ilmu rasional (hasil pemikiran dan pengalaman manusia), dengan ilmu ini manusia dapat mengatasi masalah-masalah keterbatasan sumber daya untuk mencapai *falah* (kebahagiaan).<sup>30</sup>

*Falah* (kebahagiaan) yang dimaksud adalah mencakup keseluruhan aspek kehidupan manusia, yang meliputi aspek spiritualitas, moralis, ekonomi, sosial, budaya serta politik, baik dicapai didunia maupun di akhirat.

Secara etimologi kata ekonomi berasal dari bahasa *oikonomika* (Yunani) yang terdiri dari dua kata yaitu *oikos* dan *nomos*. *Oikos* yang berarti rumah dan *nomos* yang berarti aturan atau hukum, secara garis besar diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Jadi ekonomi adalah aturan-aturan untuk menyelenggarakan kebutuhan hidup manusia dalam rumah tangga. Rumah tangga dalam hal ini meliputi rumah tangga perseorangan (keluarga), badan usaha atau perusahaan rumah tangga pemerintah, dan sebagainya.<sup>31</sup>

Sedangkan pengertian ekonomi Islam secara terminologi terdapat pengertian menurut M. Akram Kan menjelaskan bahwa ilmu ekonomi Islam bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar bekerja sama dan partisipasi. Definisi ini memberikan dimensi

---

<sup>30</sup> Andi Buchari, *Islamic Economic: Ekonomi Bukan Opsi, Tetapi Solusi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 91.

<sup>31</sup> Dedi Supriadi, *Ekonomi Mikro Islam*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2013), 13.

normatif (kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat), serta dimensi positif (mengorganisir sumber daya alam).

Dari beberapa definisi diatas dapat dilihat bahwa ekonomi Islam merupakan suatu perilaku individu dalam kegiatan ekonominya harus sesuai dengan syari'at dan tuntunan yang berlaku dalam Islam untuk mewujudkan dan menjaga *maqashyid syari'ah* (agama, jiwa, akal, nasab dan harta). Hal pokok yang kita perlukan dalam memahami bagaimana mencapai tujuan hidup, yaitu pertama tujuan untuk mencapai *falah* dan yang kedua tujuan masalah. Untuk mencapai kedua tujuan hidup tersebut, yaitu *falah* dan terutama masalah yang secara otomatis tidak dapat kita lepaskan dengan kegiatan ekonomi kita sehari-hari adalah dengan mewujudkannya dengan jalan menjalankan bentuk ekonomi Islam

Ekonomi Islam merupakan bagian dari bentuk kesempurnaan Islam sebagai sebuah agama khittah yang menyempurnakan risalah agama yang sebelumnya. Sehingga ketika berbicara ekonomi Islam, maka tidak akan pernah lepas dari sumber utama Islam itu sendiri yakni Al-Qur'an dan Sunnah yang didalamnya terdapat pedoman, nilai dan norma yang melekat bersama dengan pribadi muslim. Oleh karena itu berbicara tentang ekonomi Islam, akan sangat banyak melihat bagaimana perilaku seorang muslim yang tidak hanya berorientasi pada kepuasan namun lebih menitik beratkan masalah dengan menjaga nilai dan norma agama yang berlandaskan AlQur'an dan Sunnah.

Perilaku ekonomi muslim tidak hanya berorientasi pada kepuasan pribadi, tapi justru lebih melihat pada menjalankan peran sebagai khalifah dimuka bumi yang diatur berdasarkan syariat dimana tujuan akhir dari ekonomi adalah terciptanya masalah dalam meraih *falah*. Seorang muslim mempunyai tujuan hidup untuk mewujudkan masalah dan meraih *falah* (*falah* diartikan kesejahteraan, kemuliaan, kesuksesan dan kemenangan). *Falah* inilah selanjutnya yang menjadi tujuan akhir perilaku ekonomi muslim baik dari aspek dunia maupun aspek akhirat, baik aspek material maupun aspek spiritual. Sehingga kepuasan bukanlah menjadi segala-galanya dalam ekonomi, kepuasan akan diperoleh dari perilaku ekonomi muslim ketika terciptanya masalah dan secara otomatis akan mencapai *falah*. Untuk kehidupan dunia *falah* mencakup tiga hal yaitu kelangsungan hidup kebebasan berkeinginan serta kekuatan dan kehormatan. Sedangkan untuk kehidupan akhirat *falah* mencakup kelangsungan hidup abadi, kesejahteraan abadi, kemuliaan abadi dan pengetahuan abadi.<sup>32</sup>

Secara sederhana *falah* berasal dari bahasa Arab *aflaha-yuflifu* yang berarti kesuksesan, kemuliaan, atau kemenangan. Sedangkan masalah dapat diartikan sebagai segala bentuk keadaan, baik material maupun non material, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Dalam hal ini masalah bertujuan untuk mencapai *falah*.

---

<sup>32</sup> Sumar'in, *Ekonomi Islam Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013), 14.



Kesejahteraan masyarakat dapat dirasakan oleh masyarakat apabila dapat memenuhi kebutuhannya, selain itu tingkat kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari masyarakat dapat merasakan kebahagiaan, kesehatan tubuh, terbebasnya dari kebodohan, merasakan aman, merasakan kenyamanan dan ketentraman dalam hidupnya, serta dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.<sup>33</sup>

Amir Syarifuddin disebutkan bahwa masalah secara etimologi berarti sesuatu yang baik, oleh karena menimbulkan kesenangan dan kepuasan serta diterima oleh akal yang sehat. Ia menjelaskan bahwa tujuan Allah SWT dalam menetapkan hukum adalah untuk memberikan kemaslahatan kepada umat manusia dalam kehidupannya didunia maupun dalam persiapannya menghadapi kehidupan akhirat.

Dari segi tujuan yang hendak dicapai masalah dibagi dalam dua kelompok, yaitu:

- a. Mendatangkan manfaat kepada umat manusia, baik bermanfaat untuk didunia maupun akhirat.
- b. Menghindarkan kemudharatan (bahaya) dalam kehidupan manusia, baik kemudharatan di dunia maupun di akhirat.

Ukuran atau indikator kesejahteraan dalam konsep ekonomi Islam, sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al Ghazali bahwa kesejahteraan secara umum berkaitan dengan pemeliharaan lima tujuan dasar, yaitu agama, jiwa, akal, keluarga atau keturunan, harta atau kekayaan. Dari

---

<sup>33</sup> M Soleh Mauludin dan Ayu Wulandini Putri Pratama, "Analisis Manajemen Pendistribusian Dana Zakat Infaq Shodaqoh di Baitul Maal Hidayatullah dalam Mensejahterakan Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19" 2, no. 1 (2021): 13.

keliama tujuan dasar tersebut, masalah dibagi menjadi beberapa tingkat, yaitu:

- a. *Maslahah Dharuriyat*, adalah penegakan kemaslahatan agama dan dunia. Artinya, ketika *dharuriyat* itu hilang maka kemaslahatan dunia dan bahkan akhirat juga akan hilang, dan yang akan muncul adalah justru kerusakan dan bahkan musnahnya kehidupan. *Dharuriyat* menunjukkan kebutuhan dasar ataupun primer yang harus selalu ada dalam kehidupan manusia.
- b. *Maslahah Hajiyyah*, adalah hal-hal yang dibutuhkan untuk mewujudkan kemudahan dan menghilangkan kesulitan yang dapat menyebabkan bahaya dan ancaman, yaitu jika sesuatu yang mestinya ada menjadi tidak ada. *Hajiyyah* juga dimaknai dengan keadaan dimana jika suatu kebutuhan dapat terpenuhi maka akan bisa menambah nilai kehidupan manusia.
- c. *Maslahah Tahsiniyat*, adalah melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan menghindari yang buruk sesuai dengan apa yang telah diketahui oleh akal sehat. *Tahsiniyat* juga bisa dikenali dengan kebutuhan tersier atau identic dengan kebutuhan yang bersifat mendekati kemewahan.

Konteks penelitian ini menjelaskan bahwa dalam ekonomi islam kebutuhan masuk dalam kategori yang terkait kelangsungan hidup yang meliputi kelangsungan hidup biologis, kesehatan, kebebasan keturunan, kelangsungan hidup ekonomi, kepemilikan faktor produksi,

kelangsungan hidup sosial, persaudaraan dan hubungan sosial, pengelolaan sumber daya alam dan kemandirian.